

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

#### A. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai acuan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain : Randhi Rukmana dan Nur S Buchori melakukan penelitian yang berjudul “*Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Perberdayaan Usaha Mikro*” yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam Vol 2, No 1 (2014), ISSN: 23551755, Hal 53-71. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan interview sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data sekunder. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BMT sangat strategis dan KJKS BMT hanya memprioritaskan pada pembiayaan produktif agar secara tidak langsung masyarakat akan belajar memahami system ekonomi syariah dan mampu membedakannya dengan system konvensional (system bunga). Terdapat beberapa kesuksesan BMT dalam menyalurkan dananya demi terwujudnya misi pemberdayaan usaha mikro, yaitu letak BMT yang sangat strategis yaitu dekat dengan pasar dan banyak pelaku usaha mikro di daerah tersebut. Dan yang menjadi kendala adalah kredit macet dan sulitnya mencari nasabah yang produktif.

Sri Dewi Yusuf juga melakukan penelitian yang berjudul “*Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Ekonomi*

*Rakyat*”, yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Mizan, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014, hal 69-80. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui upaya dan peran BMT dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BMT telah membuahkan hasil yang cukup signifikan, dimana BMT mampu berperan aktif dalam membantu memberdayakan perekonomian para pelaku ekonomi lemah.

Endah Wartiningsih dan Tuty Herawati (2010) melakukan penelitian yang berjudul “*Peran BMT dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kecil (Studi kasus BMT As-Salam, Beji Timur, Depok)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran BMT terhadap masyarakat sekitarnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa diperoleh kesimpulan keberadaan BMT sangat dibutuhkan pedagang kecil sebagai nasabah BMT, para pedagang di wilayah Beji Timur sangat terbantu dengan keberadaan BMT ini. Hal ini dilihat dengan meningkatnya jumlah pembiayaan di BMT As-Salam.

Novada Mahardi Putra (2012), melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pada Bmt Beringharjo Cabang Ponorogo*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus deskriptif. Pengumpulan data dengan metode partisipatif dan wawancara mendalam terhadap informan. Teknik analisis yang digunakan

adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah BMT Beringharjo cabang Ponorogo sudah memberdayakan pengusaha UMKM yang menjadi nasabahnya. Pemberdayaan tersebut berupa pelatihan, pendampingan, dan pembinaan secara informal, serta pemberian pembiayaan. Pengusaha UMKM setelah mendapat pembiayaan dari BMT Beringharjo cabang Ponorogo mengalami perkembangan bisnis lebih baik ditinjau dari pemasaran, keuangan, teknologi, manajemen, administrasi, akuntansi, serta modal dan pendapatan. Penelitian selanjutnya untuk melengkapi secara komprehensif, untuk BMT di Indonesia diharapkan mengadakan pelatihan secara formal.

Hardianto Ritonga melakukan penelitian yang berjudul "*Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (Studi Kasus Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya)*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Amanah Ummah sudah berperan aktif dalam memberdayakan UMKM dimasyarakat Surabaya. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui tiga hal yaitu: memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil, melakukan pembinaan dan memberikan pelayanan seperti pemasaran produk/jasa kepada masyarakat.

Era Ikhtiani Rois (2010) juga melakukan penelitian yang berjudul "*Peran BMT Barokah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil di Pasar Gesikan, Ngluwar, Magelang*". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Barokah melalui optimalisasi dana ZIS, dengan memberikan bantuan melalui pembiayaan-pembiayaan dan bantuan pendidikan bagi para siswa TK, SD, MTS sampai SMK melalui beasiswa.

Dari beberapa penelitian yang diungkapkan di atas pada dasarnya penelitian tersebut bertujuan untuk mengupayakan penyaluran dana melalui pembiayaan secara maksimal dengan berbagai macam bentuk program dalam memanfaatkan dana yang dikelola bagi pengusaha kecil atau masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana dampak dari manfaat penyaluran dana tersebut dalam mensejahterakan masyarakat.

Jadi terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan penulis. Persamaan tersebut di antaranya:

1. Lembaga yang akan diteliti, yaitu BMT.
2. Objek yang dikaji, yaitu pembiayaan terhadap sektor produktif.

Sedangkan perbedaannya adalah :

1. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi kasus yang terkait dengan usaha pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil.
2. Dalam penelitian ini fokus peneliti adalah pada optimalisasi peran BMT, jadi bagaimana pihak BMT dalam mengoptimalkan pembiayaannya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perkembangan Teori Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik (Hasan, 2002: 56-57).

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya (Suhendra, 2006: 74-75).

Sedangkan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata 'budaya' yang berarti adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Secara empirik pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu dipahami sebagai usaha mencegah keadaan persaingan yang tak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi dan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan iklim yang sehat. Untuk itu pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian memihak (*targetting*), mempersiapkan (*enabling*), dan melindungi (*protecting*) (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Sunyoto Usman dalam pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat mengatakan bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam hal ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan

strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki (Abu Hurairah, 2007: 87).

Berkenaan dengan pemberdayaan, ada tiga power yang bisa menguatkan kapasitas masyarakat. Adapun power tersebut adalah :

1. *Power to* (kekuatan untuk) merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak, rangkaian ide dari kemampuan.
2. *Power with* (kekuatan dengan) merupakan tindakan bersama, kemampuan untuk bertindak bersama. Dasarnya saling mendukung, solidaritas dan kerjasama. Power with dapat membantu membangun jembatan dengan menarik perbedaan jarak untuk mengubah atau mengurangi konflik sosial dan mempertimbangkan keadilan relasi.
3. *Power within* (kekuatan di dalam) merupakan harga diri dan martabat individu atau bersama. Power within ini merupakan kekuatan untuk membayangkan dan membuat harapan. Sehingga di dalamnya berupa niat, kemauan, kesabaran, semangat dan kesadaran (<http://www.powercube.net>, diakses pada tanggal 14 Nopember 2016 pukul 13.20 WIB).

Edi Suharto (1998:220) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-

tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

2. Pendekatan *mezzo*. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
3. Pendekatan *makro*. Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini (<http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses pada tanggal 14 Nopember 2016 pukul 14.52 WIB).

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat (Karsidi, 1988), sebagai berikut:

- a. Belajar Dari Masyarakat  
Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi



pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah sendiri.

b. Pendamping sebagai Fasilitator

Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

c. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

### **3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya, karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna memahami tentang pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dengan ketidakberdayaan yang di alaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.

2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga (*Ibid*, hal.60)

#### **4. Tingkatan Pemberdayaan**

Adapun tingkatan keberdayaan masyarakat menurut Susiladirhati yang dikutip dalam bukunya Abu Hurairah adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar.
2. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
3. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan.
4. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintah (Abu Hurairah, hal 90).

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain:

1. Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin).
2. Upaya penyadaran untuk memahami diri yang meliputi potensi, kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungannya.
3. Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal.
4. Upaya penguatan kebijakan.
5. Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha atau kerja (*Ibid*, hal. 92).

#### **5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

### 1. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

### 2. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan dan sebagainya.

### 3. Kesadaran kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

#### 4. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada didalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan

#### 5. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi

kelompok, serta makin luasnya interaksi dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya (Sumodiningrat, 1999: 138-139).

## **6. Pemberdayaan dalam Pandangan Islam**

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sarat akan manfaat dan maslahat baik bagi individu maupun sosial. Islam merupakan agama yang senantiasa mengajarkan untuk memberikan manfaat dan maslahat kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan Allah.

Di sini, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan manusia merupakan salah satu isyarat kepada umat manusia agar saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketetapan Islam.

Di dalam Islam, tolong menolong yang diajarkan adalah tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa. Islam melarang umatnya tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S Al-Maidah: 2).

Dengan adanya tolong menolong memupuk untuk terciptanya persaudaraan, persatuan dan kasih sayang antar umat Islam. Sehingga menjadikan umat yang kuat dan kokoh. Adapun salah satu bentuk tolong menolong ini adalah dengan tidak membiarkan saudaranya terselubung di dalam ketidakberdayaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Yogyakarta ini dalam melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan anggotanya.

## 7. Pemberdayaan Masyarakat Oleh BMT

Memberdayakan adalah salah satu solusi dan langkah yang strategis agar mereka berkembang secara produktif. Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Gerakan lembaga keuangan pada tingkat bawah ini relatif mampu mengurangi ketergantungan masyarakat lapisan bawah dari cengkeraman rentenir, karena lembaga ini (BMT) terdiri dari dua divisi yaitu; pertama, divisi *baitul maal* yang mengelola zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) berusaha mengangkat kaum lemah untuk lebih produktif dalam hidupnya dengan memanfaatkan dana

dari ZIS yang tidak dibebani biaya pinjaman (pinjaman lunak yang bersifat sosial). Kedua, divisi *baitul tamwil* yaitu menggerakkan simpanan dan penyaluran dana (pembiayaan modal) dengan sistem bagi hasil. Diharapkan dengan sistem ekonomi Islam, masyarakat termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka (Dewi Yusuf, 2014:76)

Oleh karena itu BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang beroperasi pada level paling bawah berperan aktif dan maksimal untuk ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Ada tiga peran yang dimainkan BMT dalam membantu memberdayakan ekonomi rakyat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama yaitu (Dwi Agung, 1999:6);

- a. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- b. Sektor riil, dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil manajemen, teknis pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi tersebut mampu memberikan kontribusi laba yang proporsional untuk ukuran bisnis.
- c. Sektor religious, dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang berhak serta memberi fasilitas pembiayaan Qardul Hasan (pinjaman lunak tanpa beban biaya).



Dalam mengusahakan pemberdayaan UMKM ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh BMT, sebagai berikut (Tambunan, (2002:36) :

- a. Dukungan dan sifat birokrasi yang kondusif
  - 1) Menciptakan sistem intensif dan intensifikasi yang tepat lewat kebijakan fiskal
  - 2) Mengurangi secara maksimal intervensi (campur tangan) langsung dalam setiap sikap dalam proses dan mekanisme bisnis masyarakat
  - 3) Mengurangi secara maksimal peluang kontak langsung antara birokrat dan pengusaha dalam urusan bisnis
  - 4) Mengusahakan keterbukaan dan pemberian peluang sama dan pelayanan proporsional dan adil pada semua warga negara
  
- b. Melengkapi/memperkuat kelembagaan pasar
  - 1) Memperbanyak usaha lembaga perantara yang menjembatani sektor ekonomi rakyat yang berskala kecil, banyak dan tersebar luas itu dengan kelompok usaha ekonomi besar dan kuat
  - 2) Mengupayakan adanya perlindungan yang optimal dalam kondisi pasar yang mahal dan dilengkapi dengan perangkat perlindungan hukum yang adil, cepat dan murah serta tegas
  - 3) Dukungan modal dan pelayanan yang optimal dengan berbagai inovasi yang diperlukan bagi warga masyarakat ekonomi lemah/kecil
  - 4) Peluang serta pemberian insentif yang optimal bagi kemungkinan tersalurnya tenaga-tenaga muda berpendidikan tinggi untuk bekerja di pedesaan, baik

sebagai usahawan (usaha mandiri) maupun sebagai ahli yang profesional

- 5) Tercegahnya struktur pasar ke dalam bentuk-bentuk monopoli dan oligopoli serta selalu menghindarkan berbagai bentuk hambatan bagi para pelaku ekonomi baik pedekatan dari sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu maupun dari oknum aparat birokrasi
- c. Pembentukan lembaga sosial atau yayasan sosial yang bergerak dalam peningkatan kualitas SDM
- 1) Diutamakan pendidikan yang bersifat praktis, pemagangan untuk membentuk usahawan kecil yang tanggap terhadap semua peluang usaha, mempunyai kemampuan rata-rata kepemimpinan
  - 2) Memberi jasa asistensi dan konsultasi ditempat kerja yang mungkin gratis pada awalnya, kemudian berangsur-angsur disubsidi dan akhirnya mampu membayar sendiri
  - 3) Tempat latihan diusahakan ditempat produksi/pabrik/perusahaan kelompok besar/ekonomi kuat dalam suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dilanjutkan dalam bentuk asistensi dan konsultasi setelah masing-masing kembali ketempat semula
  - 4) Dana untuk kegiatan ini dapat berasal dari partisipasi para usaha besar sampai tingkat minimal tertentu atau dapat dibantu oleh subsidi pemerintah.

## **8. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)**

Dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur

dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kriteria tersebut digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan

kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

## **9. Teori Usaha Mikro**

Kriteria yang digunakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik adalah kriteria tenaga kerja (tk) (Wiranta, 2005: 18 dalam Supadie, 2013: 59), yakni usaha mikro atau rumah tangga menggunakan tenaga kerja 1-4 TK, usaha kecil menggunakan 5-19 TK, dan usaha menengah memperkerjakan sekitar 20-99 TK.

Adapun ciri-ciri usaha mikro dan contoh usaha mikro sebagai berikut (<http://usaha-umkm.blog.com> dalam Supadie, 2013: 61)

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu- waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.

- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Contoh usaha mikro antara lain :

- a. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya.
- b. Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat pertanian dan perkebunan.
- c. Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar dan lain-lain.
- d. Peternak ayam, itik, dan perikanan.
- e. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

Masyarakat lapisan bawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh (*underserved*) dan tidak di anggap memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga menyebabkan laju perkembangan ekonominya pada tingkat subsistensi saja. Kelompok masyarakat ini dinilai tidak layak oleh bank (*unbankable*) karena tidak memiliki anggunan, serta diasumsikan kemampuan mengembalikan pinjamannya rendah, kebiasaan

menabung yang rendah, dan mahalnya biaya transaksi (Ismawan, <http://www.akatiga.com> dalam Supadie, 2013: 63).

Akibat asumsi tersebut, maka aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya yang mereka miliki. Realitas tersebut membuktikan bahwa rakyat miskin (pengusaha mikro) bukanlah “orang yang tidak punya” (*the have not*) mereka “punya” tetapi sedikit (*the have little*). Meski dengan sedikitnya apa yang mereka miliki, mereka tetap ulet berusaha dengan modal seadanya pada masing-masing.

Sementara itu bila mereka meminjam dana untuk modal, lebih dari 70% berasal dari lain-lain (bukan lembaga keuangan formal/bank). Dari pengalaman lapangan, yang dimaksud dengan “lain-lain”, mayoritas dari usaha mikro tersebut terjebak pada *money lender* (rentenir). Kisaran bunga utang dari rentenir sangat tinggi. Meski demikian, herannya pengusaha mikro hidup dan berjalan dengan sistem tersebut. Namun, tentu saja mereka tetap terbonsai dan sulit berkembang. Salah satu cara untuk memecahkan persoalan yang pelik itu, yaitu pembiayaan masyarakat miskin pengusaha mikro, adalah melalui keuangan mikro seperti BMT (Ismawan, <http://www.akatiga.com> dalam Supadie, 2013: 64).

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menjalankan bisnis, kegiatan bisnis memerlukan sumber dana atau modal. Modal dan dana dalam konteks sumber daya ekonomi, dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan sumber daya lainnya, seperti: untuk memenuhi kebutuhan alat, sarana, bangunan dan untuk pembiayaan operasi perusahaan. Termasuk operasi perusahaan diantaranya memberikan *reward* kepada tenaga kerja yang dilibatkan dan dibutuhkan oleh kegiatan bisnis, untuk membiayai keperluan operasi (kegiatan) lainnya. Oleh karena itu, sumber permodalan merupakan faktor sumber daya ekonomi yang penting yang perlu disediakan, baik dalam konteks investasi dan operasional.

Jika bisnis syariah komit atas sistem perolehan dan pengelolaan dana tentu dana yang hendak digunakan tidak menggunakan klausul riba (*interest*) sebagai instrumen pembiayaan. Profit diberikan karena modal memberikan andil tertentu. Sementara *risk* diperhitungkan manakala takdir bahwa bisnis (sebagai pengguna dana) mengalami kerugian dan pemilik modal diperhitungkan menanggung risiko ini secara proporsional sesuai dengan proporsi dana dan tenaga (*skill*) yang dikontribusikan.

Jadi antara pemilik dana dan pengguna dana ada suka-duka kerja sama saling menguntungkan dan saling merasa senasib dan sepenanggungan jika ada resiko yang terjadi. Kalau ada untung dinikmati bersama secara adil dan jika rugi ada penanggungan bersama dengan proporsi yang pantas dan layak. Di sini letak antara lain prinsip ini menggunakan paradigma keadilan, kesetaraan dan kebersamaan dalam menggunakan dana (Muslich, 2007: hal 47-48).

## 10. Kriteria UMKM

### a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria UMKM digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha.

**Tabel 2.1**

**Kriteria UMKM**

No	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Max 50jt	Max 300jt
2.	Usaha Kecil	>50jt - 500jt	>300jt – 2,5 M
3.	Usaha Menengah	>500jt – 50 M	>2,5 M – 50 M

*Sumber : UU No 20 Tahun 2008*

### b. Kriteria UMKM Berdasarkan Perkembangan

Dari sudut pandang perkembangannya Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu:

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.



- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

**Gambar 2.1**

**Alur Penelitian**

